

DOMINASI KIAI DALAM PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN IHYA' ULUMIDDIN

Agus Mursidi

Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Banyuwangi
Email: agusmursidi@yahoo.co.id

Abstrak

Dominasi kiai menjadikan sebuah kekuasaan kiai mutlak dan tak terbantahkan. Segala kebijakan yang telah dibuat oleh kiai baik sejalan dan tak sejalan dengan lembaga pendidikan yang dinaungi oleh lembaga milik negara wajib hukumnya dilaksanakan. Dominasi lebih kuat saat kiai berpolitik dan menjadi seorang anggota dewan. Segala kuasanya mutlak terhadap lembaga yang didirikannya.

Kata kunci: dominasi, kiai, pendidikan

Abstract

Domination kiai make a power clerics absolute and irrefutable. All the policies that have been made by clerics both in line and not in line with the educational institution shaded by state-owned institution is obligatory implemented. Domination is stronger when kiai politics and became a member of the board. Mutak all his power to the institution which he founded.

Keyword: domination, kiai, education

PENDAHULUAN

Setiap lembaga pendidikan, baik pendidikan formal ataupun non formal pasti bertujuan untuk mengembangkan peserta didiknya ke arah yang lebih baik. Salah satu cara agar tujuan tersebut dapat tercapai adalah dengan melaksanakan manajemen pendidikan yang berkualitas dalam suatu lembaga pendidikan. Pesantren sebagai model lembaga pendidikan Islam pertama yang mendukung kelangsungan sistem pendidikan nasional, selama ini tidak diragukan lagi kontribusinya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus mencetak kader-kader intelektual yang siap untuk mengapresiasi potensi keilmuannya di masyarakat. Pondok pesantren

mempunyai peranan yang besar dalam dunia pendidikan, terutama dalam pendidikan Islam.

Untuk mencetak generasi penerus yang cerdas dan berahklaq mulia diperlukan pendidikan yang menyeluruh, dalam arti mencakup semua potensi baik dari aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan yang mengkombinasikan ketiga aspek tersebut, tidak hanya menekankan aspek kecerdasan kognitif semata. Akan tetapi juga menekankan pada aspek afektif dan psikomotor, yaitu dengan mengajarkan nilai-nilai dan norma yang sesuai dengan syari'at Islam serta membekali para santri dengan

keterampilan-keterampilan yang berguna bagi kehidupan sehari-hari.

Hal ini senada dengan pernyataan Setyo Rini, “Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan keagamaan yang berperan besar dalam pengembangan masyarakat terutama pada masyarakat desa, sejak awal fungsi pondok pesantren adalah sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan terutama lebih dititik-beratkan pada kegiatan belajar mengajar ilmu-ilmu keagamaan” (2003:19). Dipertegas kembali oleh Setyo Rini, “Anggapan yang salah masyarakat awam kerap menyamaratakan kehidupan pesantren. Dimana para santri hanya mengkaji ilmu-ilmu agama, tanpa mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari padahal tidak semuanya anggapan itu benar” (2003:20).

Dalam sejarahnya di masa yang lalu, pesantren telah mampu mencetak kader-kader handal yang tidak hanya di kenal potensial. Akan tetapi mereka telah mampu mereproduksi potensi yang dimiliki menjadi sebuah keahlian yang layak jual. Seperti halnya di era pertama munculnya pesantren, yaitu pada masa kepemimpinan wali songo, pesantren telah mampu melahirkan kader-kader seperti Sunan Kudus (Fuqoha), Sunan Bonang (Seniman), Sunan Gunung Jati (Ahli Strategi Perang), Sunan Drajat (Ekonom), Raden Fatah (Politikus dan Negarawan), dan para wali yang lainnya.

Mereka telah mampu menundukkan dominasi peradaban Majapahit yang telah berkuasa selama berabad-abad, yang dikenal sebagai suatu kerajaan dengan struktur pemerintahan dan pertahanan negara yang cukup disegani di kawasan Asia Tenggara. Hal ini tidak terlepas dari peran seorang Kiai sebagai pemegang otoritas utama dalam pengambilan setiap kebijakan pesantren. Sebagai seorang *top leader*, kiai diharapkan mampu membawa pesantren untuk mencapai tujuannya dalam mentransformasikan nilai-nilai ilmiah (terutama ilmu keagamaan) terhadap umat (santri) sehingga nilai-nilai tersebut dapat mengilhami setiap kiprah santri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kiai di dalam dunia pesantren sebagai penggerak dalam mengemban dan mengembangkan pesantren sesuai dengan pola yang dikehendaki. Dengan demikian kemajuan dan kemunduran pondok pesantren benar-benar terletak pada kemampuan kiai dalam mengatur operasionalisasi pendidikan di dalam pesantren. Sebab kiai sebagai penguasa baik dalam pengertian fisik ataupun yang non fisik yang bertanggung jawab demi kemajuan pesantren. Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2003, “Pesantren menjadi salah satu komponen terpenting dalam pendidikan keagamaan, berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota yang memahami dan

mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam dan menjadi ahli dalam bidang agama. Pondok pesantren dan semua sistem yang ada di dalamnya mendapat pengakuan setelah diberlakukannya UU No 20 tahun 2003.”

Dari pernyataan tersebut, hal ini menjadi logis ketika hampir semua lembaga pendidikan di Indonesia termasuk sebagian pesantren sudah mulai berlomba-lomba melakukan pengembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Terlebih saat munculnya istilah era tinggal landas, modernitas, dan globalisasi. Pondok pesantren dalam perkembangannya menjelma sebagai lembaga sosial yang memberikan warna khas bagi perkembangan masyarakat sekitarnya. Peranan pesantren pun berubah menjadi agen pembaharuan (*agent of change*) dan agen pembangunan masyarakat.

Sehingga dari fenomena tersebut terlihat jelas bahwa seorang pemimpin dalam pondok pesantren atau kiai yang memiliki kredibilitas dan otoritas. Sudah seyogyanya untuk dapat berfikir inovatif dan kreatif untuk dapat menyelaraskan pendidikan yang ada di dalam pondok pesantren baik antara pendidikan agama atau pengetahuan sosial. Pendidikan agama merupakan identitas pondok dengan ilmu-ilmu guna terciptanya keseimbangan antara individu-individu (santri atau siswa) maupun masyarakat yang berjiwa imtak dengan iptek yang

sudah merupakan kebutuhan sekaligus jawaban dari tantangan zaman di era modernisasi ini.

Pondok Pesantren Ihya'Ulumiddin merupakan salah satu pondok pesantren yang beralamatkan di Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi yang telah melakukan pembaharuan terkait pendidikan yang ada didalamnya baik pendidikan umum dengan pendidikan agama dan dengan melalui revolusi sistem salafi (tradisional) ke sistem khalafi (modern).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengeksplorasi, mengkaji dan membahas tentang bagaimana “Dominasi Kiai Dalam Pendidikan Di Pondok Pesantren Ihya'ulumiddin Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi” untuk membangun, mengelola, menyikapi serta menjawab persoalan santri dalam mengembangkan khasanah pendidikan pesantren (kultur budaya santri) dan juga menjawab tantangan zaman atau dunia modern.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan mengemukakan dan mengkaji masalah yang berkaitan dengan dominasi kiai dalam pendidikan di Pondok Pesantren Ihya' Ulumiddin yang meliputi: Adakah dominasi kiai dalam pendidikan di pondok pesantren, Apa bentuk-bentuk dominasi yang dilakukan kiai dalam perkembangan pendidikan di pondok pesantren, dan

Sejauh mana daya dukung dan hambatan dominasi kiai dalam kultur di pondok pesantren. Hasil dari penelitian ini diharapkan Secara teoretis, penelitian ini diharapkan untuk dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai dominasi kiai dalam pendidikan di pondok pesantren yang nantinya dapat dijadikan jawaban dalam permasalahan umat dalam menghadapi era modernisasi baik mengenai permasalahan pendidikan agama (pesantren), pendidikan umum, ekonomi, sosial dan budaya.

Kebanyakan para kiai beranggapan bahwa suatu pesantren dapat diibaratkan sebagai suatu kerajaan kecil di mana kiai merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan (*power and authority*) dalam kehidupan, pendidikan dan lingkungan pesantren (Dhofier, 2011: 94). Kiai juga merupakan suatu bentuk elit tersendiri dalam bidang sosial-ekonomi, Karena biasanya kiai merupakan tokoh yang dari segi finansial cukup kuat dan mempunyai hubungan dengan tokoh-tokoh serta pengusaha muslim yang kaya. Hal ini dapat dipahami karena untuk membiayai kegiatan pesantren diperlukan dana yang sangat besar.

Mengenai tugas dan kedudukan kiai ini ada beberapa ulama' yang memberikan gambaran tentang posisi ahli agama ini. Manfred Ziemek menempatkan kedudukan seorang kiai sebagai pemimpin sentral yang

berkuasa pernah di dalam pesantren. Di dalam bukunya "Pesantren dalam Perubahan Sosial", bahwa dalam pesantren kiai memiliki otoritas, wewenang yang menentukan semua aspek kegiatan pendidikan dan kehidupan agama atas tanggung jawabnya sendiri (Ziemek, 1986:138). Sedangkan, Zamakhsyari Dhofier berpendapat tentang tugas dan kedudukan kiai dalam bukunya "Tradisi Pesantren", bahwa profil mereka (Kiai) sebagai pengajar Islam membuahakan pengaruh yang melampaui batas-batas desa dimana pesantren mereka berada. (Dhofier, 1982:56).

Dominasi diartikan sebagai penguasaan, penempatan posisi bagus dan kuat; pengaruh besar (Partanto dan Albarry, 1994: 11). Dominasi berasal dari bahasa Yunani kuno disebut *eugemonia*, diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi negara-negara kota secara individual, misalnya yang dilakukan oleh negara kota Athena terhadap negara kota lainnya (Magnis-Suseno, 2003: 8). Dalam upaya memisahkan negara (*political society*) dan masyarakat sipil (*civil society*), Gramsci (Patria dan Arief, 2003) memulai dengan tiga batas konseptualisasi dalam membicarakan hegemoni. Kesemuanya itu menunjuk pada identifikasi hubungan antar formasi sosial yang membentuk garis dasar konseptualisasi hegemoni. Ketiga batasan tersebut adalah: ekonomi, negara

(*political society*), dan masyarakat sipil (*civil society*). Ekonomi sebagai konseptualisasi yang pertama, merupakan sebuah batasan yang digunakan untuk mengartikan *mode of production* yang paling dominan dalam sebuah masyarakat. Cara produksi tersebut terdiri dari teknik produksi dan hubungan sosial produksi yang ditumbuhkan atas munculnya perbedaan kelas-kelas sosial dalam arti kepemilikan produksi.

Kedua, batasan negara, merupakan batas yang berarti tempat munculnya praktek-praktek kekerasan (polisi dan aparat lainnya) dan tempat terjadinya pendirian birokrasi negara. Batasan ketiga, yaitu masyarakat sipil, batasan yang merujuk pada organisasi lain di luar negara dalam sebuah formasi sosial di luar bagian sistem produksi material dan ekonomi, yang didukung dan dilaksanakan oleh orang atau komponen di luar batasan di atas. Bagi Gramsci (Patria dan Arief, 2003:10) ketiganya harus memiliki demarkasi yang jelas. Meskipun demikian, ditingkat analisis dan empiris sering terjadi beberapa bagian organisasi dan institusi mungkin berada dalam sebuah batas, dua batas, bahkan tiga batas. Gramsci mengidentifikasi birokrasi sebagai pelayanan sipil, kesejahteraan, dan institusi pendidikan (Patria dan Arief, 2003:10).

Kata "Pondok" dalam bahasa Indonesia mempunyai arti kamar, gubuk atau rumah kecil dengan menekankan

kesederhanaan bangunannya. Pondok juga berasal dari bahasa arab "funduq" yang berarti ruang tidur, wisma, hotel sederhana atau mengandung arti tempat tinggal yang terbuat dari bambu (Masdar, 1999: 61). Secara etimologi (arti bahasa pesantren berasal dari kata dasar "santri" yang dibubuhi awalan "pe" dan akhiran "an" yang berarti tempat tinggal para santri (Dhofier, 1997:18).

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam dengan seorang atau beberapa santri belajar pada pemimpin pesantren (kiai), dibantu oleh beberapa guru (ulama/ustadz). Di dalamnya terdapat lima elemen dasar yang tidak terpisahkan, yaitu: pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab kuning, santri dan kiai inilah yang disebut sebagai tradisi pesantren. Gus Dur menyebutkannya sebagai kultur pesantren, yaitu kultur sosio-religius yang merupakan hasil interaksi kehidupan pondok, masjid, santri, ajaran ulama terdahulu yang tertuang dalam kitab klasik dan kehidupan kiai (Effendy, 1998:106). Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, merupakan sistem pendidikan nasional asli, yang telah lama hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat Indonesia (Syarif, 1982:5).

Berdasarkan undang-undang RI No.20 Tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat dan bangsa.

Sedangkan Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif supaya memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian serta akhlak mulia.

Dimiyati, sebagaimana dikutip oleh (Wahyudin, 2007: 216) memberikan pengertian pendidikan sebagai “proses interaksi yang bertujuan; guru berinteraksi dengan siswa yang bertujuan meningkatkan perkembangan mental sehingga menjadi pribadi yang mandiri dan utuh”. Sementara Marimba sebagaimana dikutip (Tafsir, 2004: 24) menyebutkan bahwa” Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama”.

Kata pendidikan juga terkadang dianggap semakna dengan kata

pengajaran, padahal kedua kata ini mempunyai makna dan tujuan berbeda. Pendidikan yang diungkapkan oleh (Jamaludin Mahfudz, 2003: 154) bahwa kata pendidikan lebih luas maknanya dari kata pengajaran. Makna pendidikan mencakup semua kebangkitan dan peningkatan positif yang terjadi berkat kekuatan seseorang; sementara makna pengajaran adalah terbatas hanya pemindahan pengetahuan saja (*transfer of knowledge*).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah Pondok Pesantren Ihya Ulumiddin Padang yang merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Desa Padang Kecamatan Singojuruh yang kini menjelma sebagai pesantren dengan wadah pendidikan terbanyak meliputi RA, MTs, MA, dan Sekolah Tinggi Agama Islam.

Untuk memperoleh data dipergunakan wawancara terhadap pemimpin pesantren (kiai), wakil kiai (direktur ma’had), dewan asatidz dan beberapa masyarakat guna untuk mendapatkan informasi tentang penelitian yang berjudul “Dominasi Kiai dalam Pendidikan di Pondok Pesantren Ihya’Ulumiddin”. Observasi adalah salah satu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan

cara melengkapi data dengan format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Di samping observasi, dilakukan pula dokumentasi sebagai bentuk pendalaman wawasan tentang Pondok Pesantren Ihya Ulumiddin dari sejarah pendiriannya dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kiai.

Data yang diperoleh kemudian akan dianalisa interatif melalui tiga tahapan reduksi data, sajian data, dan verifikasi dan menarik kesimpulan (Sutopo, 2006: 120). Ketiga komponen analisis di atas dapat saling menjalin secara baik sebelum, pada waktu, maupun sesudah pelaksanaan pengumpulan data secara paralel. Ketiga komponen tersebut dapat pula aktivitasnya berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus. Dalam penelitian ini peneliti bergerak di antara keempat komponen (tiga komponen analisis data) selama proses pengumpulan data berlangsung, kemudian bergerak di antara reduksi data, sajian data dan mengambil gambaran simpulan atau verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya Perbedaan pemahaman tentang dominasi kiai dalam pendidikan di pondok pesantren

Kecenderungan setiap orang terhadap pemahaman suatu kata, makna, nalar, pemikiran dan lain

sebagainya sangat berbeda-beda hal ini tentunya di dasari oleh tingkat intelektual seseorang itu sendiri, seperti yang terjadi pada observasi dan proses analisa data di lapangan, terdapat beberapa perbedaan pemahaman mengenai bagaimana dominasi kiai dalam pendidikan. Dalam hal ini peneliti menemukan penjelasan yang berbeda, hal ini disebabkan oleh pengamatan dan pemahaman dari sudut pandang yang berbeda dan juga dari penguasaan terhadap pembendaharaan kata dari masing-masing informan.

Tentunya hal ini sedikit membingungkan peneliti terhadap data yang diperoleh, hal ini juga didasari dari pemahaman atau persepsi makna dari arti kata dominasi itu sendiri, khususnya mengenai “dominasi kiai dalam pendidikan” dan juga seperti yang telah dikatakan bahwa hal ini juga didasari atas pemahaman dari sudut pandang yang berbeda, namun setelah disatukan antara pendapat satu dengan yang lain, data tersebut intinya sama hanya saja penyampaiannya yang berbeda dan memang ada beberapa penafsiran yang berbeda juga.

Sehingga dari observasi, wawancara dan analisa data yang telah peneliti lakukan serta beberapa penjelasan yang didapat dari beberapa informan, peneliti dapat mengambil inti sari (kesimpulan) atau data yang kongkrit dari tujuan awal penelitian, yaitu

mengenai "dominasi kiai dalam pendidikan di Pondok Pesantren Ihya'Ulumiddin".

Kurang Adanya Koordinasi Antara Lembaga Pendidikan Terkait Dengan Pondok Pesantren

Suatu cita-cita atau suatu tujuan akan cepat berhasil, paling tidak akan gampang dalam proses pencapaiannya jika didasari dengan 3 kunci kerja yang meliputi: koordinasi, komunikasi dan integrasi dan juga tentunya harus dilandasi dengan keikhlasan dan semangat perjuangan serta pengorbanan. Sesuatu tujuan yang dalam proses kerjanya tidak didasari oleh ketiga hal tersebut sangat mustahil akan mengalami keberhasilan, dan bahkan sebaliknya.

Harus disadari dan dipahami bahwa untuk mencapai suatu tujuan, lebih-lebih sebuah tujuan lembaga. Khususnya lembaga pendidikan perlu adanya sebuah *team work* yang harus sejalan beriringan berdasarkan komando dan koridor yang telah ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan perundang-undangan, aturan main, kebijakan lembaga yang sah berdasarkan musyawarah dan lain sebagainya. Jika hal itu tidak terjadi dalam sebuah pengelolaan lembaga, khususnya lembaga pendidikan maka yang terjadi hanyalah akan merujuk dan mengarah pada suatu persaingan, selisih pendapat, bahkan saling menjatuhkan antar pengelola yang

satu dengan yang lain, padahal secara sadar mereka adalah *team work* yang selalu searah demi satu tujuan. Sehingga hal ini tentunya akan menghambat bahkan membuat lemah suatu lembaga tersebut.

Hal inilah yang terjadi di lembaga pendidikan dan Pondok Pesantren Ihya' Ulumiddin. Khususnya tentang kebijakan pondok pesantren yang dikeluarkan oleh kiai yang selipkan terhadap kebijakan SMKN. Dominasi kiai yang berjalan memaksa kebijakannya masuk kepada kebijakan SMKN, hal ini berakibat fatal terhadap suasana kehidupan pendidikan di SMKN Ihya Ulumiddin. Sehingga orang-orang atau pengelola yang ada di SMKN yang lebih didominasi oleh orang-orang pegawai negeri sipil (PNS) yang secara mayoritas tidak memiliki latar belakang pendidikan keagamaan atau bahkan pondok pesantren, terkadang menganggapnya sebagai suatu hal yang keliru dan bahkan menganggap suatu yang salah, akan tetapi dalam prakteknya hal ini (kebijakan kiai) tersebut selalu disetujui oleh semua kalangan yang ada di dalamnya, lebih-lebih dalam suatu forum, khususnya para PNS itu tadi. Hal ini terjadi karena para pengelola SMKN yang didominasi oleh pegawai negeri sipil tersebut tidak berani menyangkal dan bahkan memprotes terhadap kebijakan kiai tersebut. Sehingga hal-hal yang sudah disepakati bersama dalam suatu forum

tersebut hanyalah kesepakatan yang tidak dilandasi dengan keikhlasan bagi yang kontra dan pastinya kan menyebabkan ketidakstabilan dalam aplikasi atau pelaksanaannya. Misalnya: di dalam sekolah SMKN disetiap bulan pada hari Jum'at dijam pelajaran ke 1-2 diadakan kegiatan istighosah bersama di lapangan. Tujuan kiai melakukan kegiatan ini adalah untuk membentuk pribadi dan akhlak siswa agar lebih agamis serta berwawasan IMTAQ karena sekolah ini berada di dalam lingkup pondok pesantren. Nah, dalam hal ini banyak guru PNS yang protes dan berpendapat bahwa kegiatan ini hanya akan menyita waktu pelajaran saja, Namun kegiatan ini terus berjalan dan tidak ada pihak yang kontra tersebut untuk melakukan protes.

Selisih pendapat ini menyebabkan kesenjangan sosial antara beberapa pihak sekolah dengan pengelola pondok pesantren dan ini merupakan masalah intern yang terjadi sampai saat ini. Contoh lain yaitu terkait kesepakatan antara SMKN dengan pondok pesantren, salah satunya kesepakatannya adalah bagi santri yang berperilaku tidak baik atau biasa kita sebut sebagai santri nakal dengan tingkat yang dianggap sangat berat maka harus dikeluarkan dari pondok dan juga dikeluarkan dari sekolah. Akan tetapi pada kenyataannya, setelah dikeluarkan dari pondok siswa tersebut masih sekolah di SMKN tersebut dan tidak

ada tindak lanjut dari pihak pondok pesantren dan khususnya dari pihak sekolah sendiri, mereka menilai bahwa kepentingan pondok atau kebijakan pondok harus diselesaikan di pondok pesantren sendiri dengan tidak harus ada campur tangan dari sekolah. Sehingga hal ini yang selalu menjadi konflik internal yang tentunya akan berakibat pada ketidakstabilan terhadap keputusan dan kebijakan yang telah ditetapkan bersama.

Adanya Kewajiban Mondok Bagi Siswa Jalur Mandiri

Adanya aturan baru dari pondok pesantren tentang kewajiban mondok bagi siswa-siswi yang tidak lolos dalam seleksi masuk di SMKN, dan juga ditopang dengan adanya perundang-undangan baru (perda/perbub) No. 38 Tahun 2013 bab 5 pasal 7 ayat 1, tentang penyelenggaraan pendidikan yang di dalamnya mengatakan bahwa "Peserta didik baru yang bersedia mondok dan bermukim penuh pada pondok pesantren yang memangku satuan pendidikan dinyatakan diterima sebagai peserta didik" jadi pada intinya dijadikan sebuah kebijakan untuk mewajibkan mondok bagi siswa-siswi yang tidak lolos selektif.

Hal ini bagi sebagian masyarakat (orang tua siswa) atau siswa itu sendiri merasa sangat keberatan, selain karena tidak adanya niat untuk mondok yang

tentunya akan mempengaruhi kesungguh-sungguhan belajar di pondok yang dalam hal ini karena tidak dilandasi dengan adanya niat awal atau niat ikhlas untuk mondok, juga akan berakibat terhadap adanya pembiayaan yang ganda antara pondok pesantren dengan biaya sekolah. Artinya selain adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh sekolah ada juga biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya di pondok pesantren itu sendiri. Nah, hal ini bagi masyarakat (orang tua siswa) dan siswa yang tidak ada niatan mondok dan juga bagi mereka yang keadaan ekonominya menengah ke bawah atau bahkan lemah akan sangat memberatkan.

Namun hal ini sering kali terjadi dan di buat akal-akalan saja. terkadang ada sebagian orang tua siswa yang memondokkan anaknya semata-mata hanya agar supaya bisa masuk di SMKNnya dan setelah anaknya masuk di SMKN beberapa bulan kemudian anak ini berhenti mondok, karena dasar tidak ada niat itu tadi dan juga adanya biaya ganda yang cukup besar. Sehingga hal ini yang menjadi trauma bagi sebagian khalayak khususnya wali murid dan murid itu sendiri terkait dengan adanya kewajiban mondok yang tidak begitu mereka kehendaki dan tentunya juga akan mengakibatkan adanya biaya ganda yang pastinya sangat memberatkan terhadap wali murid dengan keadaan ekonomi yang sangat pas-pasan atau

bahkan bagi mereka yang kekurangan atau tidak mampu.

Kiai Berpolitik: Perspektif Masyarakat Awam

Politik itu kotor, itulah kalimat yang selalu terdengar nyaring ketika mengomentari perilaku politik yang tidak terpuji. Kalimat tersebut begitu akrab, sehingga siapapun pasti sudah mendengarnya. Seperti halnya kiai yang terjun dalam dunia politik. Semua sudah memahami bahwa kiai kiprahnya demikian kompleks, dari menjadi rujukan persoalan agama sampai permasalahan rumah tangga. Dengan pemahaman dan suri tauladan yang dimilikinya, wajar bila banyak lapisan masyarakat mempercayakan berbagai persoalan yang dihadapi kepada kiai. Bagaimana baiknya kiai berperilaku.

Pada dasarnya kiai adalah guru yang lebih menitik beratkan (*focus of interest*) pada aspek pendidikan dari pada pengajaran kepada santrinya. Dalam konteks ini pendidikan yang mengarah kepada pengalaman dan keteladanan serta lebih penting dari pada sekedar *transfer of knowledge*. Kiai biasanya lebih mengontrol shalat jamaah santrinya dari pada mengontrol sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi pengajaran yang diajarkannya.

Dalam prespektif pemerintah, kekuasaan kiai cukup kuat untuk

mempengaruhi tindakan sosial dan politik masyarakat. Hal ini karena kiai adalah pemegang legitimasi keagamaan. Legitimasi keagamaan ini oleh pemerintah atau para elit politik dapat digunakan untuk melegalkan tindakan-tindakan duniawi mereka. Otoritas kiai tidak selamanya langgeng. Tidak sedikit kiai yang otoritasnya hancur akibat “berselingkuh” dengan penguasa atau memang “mabuk” kekuasaan. Pada saat umat sudah tidak percaya lagi terhadap otoritas kiai, saat itu juga umat secara perlahan akan meninggalkannya. Tidak dapat dipastikan secara jelas, apakah yang melatarbelakangi munculnya persepsi yang beragam atas keterlibatan kiai dalam politik. Banyak tuduhan miring juga dilimpahkan pada kiai yang terlibat dalam politik. Utamanya politik praktis. Tidak dapat dipastikan juga apakah tuduhan itu merupakan bentuk kekhawatiran atas keterlibatan kiai dalam konstelasi politik atau cenderung meremehkan kapasitas politik kiai.

Dari analisis di atas, keterlibatan kiai dalam politik kemudian bermunculan, ada yang berargumen bahwa arah perkembangan dan sistem politik yang tidak lagi mengedepankan nilai-nilai dan akhlaqul karimah memberikan alasan bagi keterlibatan kiai. Seharusnya kiai bersama masyarakat (bersih) ‘ndandani’ politik yang sudah terlanjur buruk citranya

serta kiai dapat memperbaiki sistem dan kultur politik kita yang terjadi kemudian bisa jadi malah politik mengotori citra kiai.

Oleh karena itu banyak yang menaruh kekhawatiran dengan keterlibatan kiai dalam politik. Karena dalam pandangan masyarakat sudah terlanjur memiliki persepsi negative terhadap politik. Itulah sebabnya, asumsi utama yang harus dibangun adalah bahwa kiai sebagai manusia dan sebagai panutan umat sebagian ruang memberikan kecerdasan dalam berdemokrasi. Harusnya menjadi satu kesatuan, meskipun bukan menjadi suatu keharusan bagi kiai untuk berpolitik lewat partai politik atau perebutan kekuasaan. Keterlibatan politik kiai harus dimainkan dalam sebuah koridor moralitas sesuai dengan integritas dan posisinya.

PENUTUP

Mengenai “Dominasi Kiai Dalam Pendidikan Di Pondok Pesantren Ihya’ulumiddin” dapat disimpulkan bahwa dominasi kiai dalam pendidikan di pondok pesantren ini sangat besar dan kuat. Hal ini didasarkan pada kedudukan kiai itu sendiri sebagai pengasuh, yang tentunya menjadi figur yang disegani, dihormati, sosok yang kharismatik dan keilmuannya dan juga memiliki karakteristik religius serta kedekatan batiniyah terhadap sang kholiq

(Hablumminalloh). Anggapan tersebut yang membuat kiai disegani dan dihormati secara status sosial di masyarakat. Selain itu kiai juga merupakan promotor terkait semua aspek, baik terkait dengan penentu kebijakan, keputusan, kewenangan baik mengenai pengurusan, pendidikan, manajemen dan lain sebagainya.

Dengan kata lain kiai merupakan sentral dari segala aspek dan cenderung mempunyai *hak veto* dalam segala hal secara mayoritas. Sehingga maju dan mundurnya sebuah lembaga pendidikan pondok pesantren atau pendidikan formal yang ada di lingkup pondok pesantren itu terletak dari bagaimana manajerial dari kiai itu sendiri, karena kiai ini merupakan sentral, pijakan, kepala serta komando terhadap jalannya sebuah pendidikan. Sehingga kiai memiliki peran esensial dalam pembangunan, perkembangan, pengurusan serta peningkatan kemajuan atau peningkatan kualitas serta mutu pendidikan dalam pondok pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, P. Partanto dan M. Dahlan AL Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Popular*. Surabaya: Arloka.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1982. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES.
- , 1997. *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LPES.
- , 2011. *Tradisi Pesantren (studi Pandangan Hidup*

- Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*). Jakarta: LP3ES.
- Effendy, Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Jamaludin Mahfudz. 2003. *Psikologi Anak dan Remaja Muslim*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Magnis-Suseno, Franz. Dkk. 2003. *Dalam Bayangan Lenin: Enam Pemikir Marxisme dari Lenin sampai Tan Malaka*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Masdar, Umaruddin. 1999. *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Patria, Nezar dan Andi Arief. 2003. *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Perbub No.38 tahun 2013 bab 5 pasal 7 ayat 1 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Setyorini, Rahayu. 2003. "Perbandingan Hasil Belajar Matematika antara Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dan STAD pada Pokok bahasan Sistem Persamaan Linier pada Siswa Kelas I Semester II SMU N I Guntur Kabupaten demak tahun Pelajaran 2002/2003". Skripsi. FMIPA UNNES.
- Syarif, Hidayatullah. 1982. *Perkembangan Agama Islam*. Surabaya: IAIN.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.
- UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang pendidikan.
- Tafsir, Ahmad. 2004. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Rosdakarya.
- Wahyudin. Din, Dkk, 2007. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Universitas Jakarta.
- Ziemek, Manfred., 1986. *Pesantren dalam Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M.